

# **Evaluasi Tiga Tahun Pemberantasan Korupsi Jokowi - JK**

Indonesia Corruption Watch

20 Oktober 2017

INDONESIA CORRUPTION WATCH

# Komitmen Antikorupsi Nawa Cita

## **Komitmen antikorupsi Pemerintahan Jokowi-JK tercantum pada agenda prioritas Nawa Cita, diantaranya ;**

- Pemerintah tidak absen untuk membangun tata kelola Pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya, dengan memberikan prioritas pada upaya memulihkan kepercayaan publik pada institusi-institusi demokrasi dengan melanjutkan konsolidasi demokrasi melalui reformasi sistem kepartaian, pemilu dan lembaga perwakilan. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, konsisten menjalankan agenda reformasi birokrasi perbaikan kualitas pelayanan publik, serta membuka ruang partisipasi publik.
- Melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya. pemberantasan mafia peradilan dan penindakan tegas terhadap korupsi dilindungi Peradilan; pemberantasan tindakan penebangan liar, perikanan liar dan penambangan liar, pemberantasan tindak kejahatan perbankan dan kejahatan pencucian uang.

## **Bidang : Korupsi Politik**

- **Pembenahan Tata Kelola Partai Politik**

- Jokowi-JK berkomitmen merestorasi UU Parpol dan mengatur pembiayaan parpol melalui APBN/ APBD yang diatur dengan UU Partai Politik.
- Hingga tahun ke-3, komitmen pembenahan partai belum diwujudkan. UU Parpol belum dibahas walau masuk dalam prolegnas. Pemerintah baru akan menaikkan subsidi dengan hanya merevisi PP No. 5 tahun 2009 sehingga tidak menyentuh pembenahan parpol di sektor lainnya (kaderisasi; demokrasi internal; transparansi dan akuntabilitas; dan sanksi).

- **UU Pemilu**

- Pemerintah bersama DPR berhasil merampungkan UU Pemilu dalam satu naskah.
- Namun, banyak masalah krusial dalam pemilu tidak terjawab dengan regulasi yang komprehensif (seperti politik biaya tinggi dan politik uang). Pemerintah dan DPR justru banyak berdebat dalam isu-isu yang tidak perlu dan menimbulkan kontroversi, seperti:
  - Wacana pengembalian sistem pemberian suara ke proporsional tertutup atau terbuka terbatas;
  - Usulan DPR mengenai penambahan jumlah kursi DPR tidak ditolak oleh pemerintah;
  - Pemberlakuan Presidential Threshold yang tidak relevan lagi dengan penyelenggaraan Pemilu Serentak.
  - Menekan cost politik tinggi dalam pemilu dengan subsidi tapi di sisi lain menaikkan batasan pemberian sumbangan dana kampanye oleh perseorangan dan badan usaha.

## **Bidang : Korupsi Politik**

- **Sikap Pemerintah Terhadap Penggunaan Hak Angket DPR untuk KPK**
  - Sesuai Nawacita, Jokowi-JK menyatakan komitmen mendukung KPK dan menjaga KPK sebagai lembaga independen yang bebas dari pengaruh kekuatan politik.
  - Dalam tahun ke-3, KPK justru mendapat “serangan” dari DPR yang dipelopori oleh partai-partai pendukung Jokowi-JK dengan penggunaan hak angket yang bermasalah.
  - Presiden Jokowi berkali-kali menunjukkan sikap positif dengan mengeluarkan pernyataan menolak segala bentuk pelemahan KPK dan menolak permintaan konsultasi pansus.
  - Namun, sikap tersebut tidak tercermin dalam pandangan pemerintah (Kemendagri dan KemenkumHAM) yang dibacakan dalam JR UU MD3 yang mengatur Hak Angket. Pemerintah menilai bahwa penggunaan hak angket DPR kepada KPK sebagai penggunaan wewenang DPR yang tidak bermasalah.



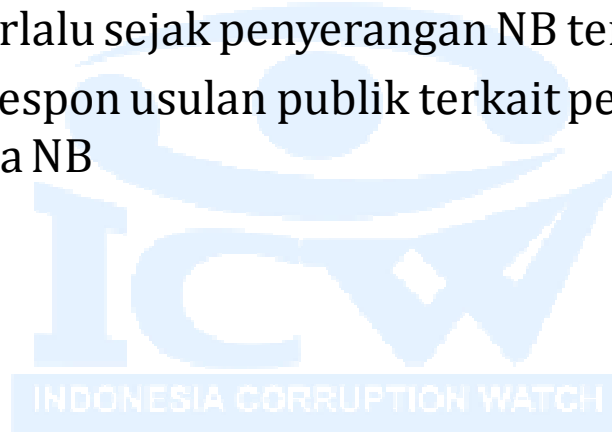
## **Bidang : Penegakan Hukum**

### **Kejaksaan Agung**

- Tidak ada upaya bersih-bersih dari terhadap internal Lembaga Penegak Hukum, termasuk di Kejaksaan Agung Republik Indonesia
- Jaksa Agung cenderung defensif dan mengeluarkan komentar-komentar yang memicu ketegangan antar lembaga penegak hukum

### **Kepolisian**

- Langkah positif Kapolri dengan mengeluarkan Perkap No 8/2017 soal kewajiban pelaporan LHKPN bagi PN di lingkungan Kepolisian, Perkap No 9/2017 tentang aturan usaha bagi anggota Polri dan Perkap No 10/2017 soal kepemilikan barang mewah bagi anggota dan keluarga Polri
- Tidak jelas kemajuan penanganan kasus penganiayaan Novel Baswedan, sudah lebih 6 (enam) bulan berlalu sejak penyerangan NB terjadi 11 April 2017
- Presiden tidak juga merespon usulan publik terkait pembentukan TGPF untuk membuat terang perkara NB



## **Bidang : Penegakan Hukum**

### **Kebijakan Tidak Pro Pemberantasan Korupsi**

- SE Setkab dan Inpres 1/ 2016 rawan memunculkan impunitas, khususnya pada angka (1), (2), (6) dan (8) pada Inpres 1/ 2016
- Selain Inpres 1/ 2016, ketidakberpihakan Pemerintahan Jokowi – JK juga dapat dilihat dari Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi. Inpres tidak dibarengi dengan mekanisme *reward and punishment* sehingga minim daya paksa dalam penerapannya

### **Tunggakan Komitmen Nawa Cita dalam Upaya Pemberantasan Korupsi**

- Pemberantasan Kejahatan Perbankan dan Pencucian Uang
  - RUU Pembatasan Transaksi Penggunaan Uang Kartal sudah masuk Prolegnas 5 Tahun
  - Pemerintah dan DPR belum membahas RUU Pembatasan Transaksi Penggunaan Uang Kartal

### **Kinerja Penindakan Kasus Korupsi Belum Optimal**

- Ada sebanyak 1.306 kasus korupsi yang ditangani oleh APH sejak Januari 2015 hingga September 2017. Jumlah tersangka mencapai 3.018 orang. Kerugian negara yang ditimbulkan mencapai Rp 7,8 triliun dan nilai suap sebesar Rp 717 miliar.
- Jumlah kasus yang disidik oleh APH tidak menjamin proses penanganan kasus korupsi dapat diselesaikan hingga tuntas.
- Masih ada beberapa kasus yang belum terselesaikan oleh Bareskrim.
- Pangkal dari tidak berjalannya proses penanganan kasus korupsi karena kurangnya alat bukti, seperti bukti untuk menghitung kerugian negara.

## **Bidang : Reformasi Birokrasi & Pelayanan Publik**

### **Saber Pungli Kurang Efektif**

- Salah satu kasus pungli menonjol ketika ditangkapnya pejabat di Ditjen Hubla Kemenhub. Presiden membentuk Tim Saber Pungli berdasarkan Perpres 86 tahun 2016.
- Ada sebanyak 78 kasus pungli yang melibatkan 182 orang. Sebanyak 45 kasus atau sekitar 58 persen diantaranya belum diproses hingga ke penuntutan.
- Meskipun banyak kasus pungli yang ditindak, namun hanya sedikit yang masuk pengadilan. Bahkan pihak-pihak yang diduga terlibat dilepaskan, seperti yang terjadi di Kota Batu, Jatim.
- Secara singkat penindakan pungli “Ramai di awal, sepi di akhir”. Gaung tim ini mulai berkurang. Keberadaan Saber Pungli dinilai kurang efektif karena hanya sebatas *shock therapy* dan belum diikuti dengan membangun sistem pencegahan pungli pasca OTT.

### **Pencegahan Korupsi di Desa Belum Optimal**

- Upaya pencegahan penyelewengan dana desa terus dilakukan salah satunya dengan membentuk Satgas Dana Desa berdasarkan Keputusan Menteri Desa Nomor 50 Tahun 2017.
- Namun upaya tersebut gagal dilakukan ketika ada kasus yang melibatkan Kepala Desa Dassok di Pamekasan bersama dengan Bupati dan Kajari.
- Berdasarkan catatan ICW ada peningkatan kasus korupsi terkait pengelolaan anggaran desa. Ada sekitar 106 kasus korupsi sepanjang 2015-September 2017. ada sekitar 101 Kepala Desa dan 6 Perangkat Desa. Kerugian negara yang ditimbulkan mencapai Rp 39,5 miliar.

## **Bidang : Reformasi Birokrasi & Pelayanan Publik**

### **Pemerintah Jokowi-JK gagal merespons kegagalan proyek KTP Elektronik**

- Dampak yang paling kasatmata adalah tidak terlayannya pengajuan permohonan KTP dan berlarut-larut hingga saat ini.
- Pemerintah Jokowi-JK seharusnya segera mencari jalan keluar dan melakukan percepatan evaluasi serta menyusun program revitalisasi pencatatan dan kependudukan.

### **Buruknya Layanan dan meningkatnya Korupsi Dana Jaminan Kesehatan**

- Hingga 8 September 2017, jumlah peserta Jaminan Kesehatan Nasional-KIS telah mencapai 181,2 juta jiwa di seluruh Indonesia. Anggaran yang dialokasikan APBN 2015 mencapai Rp 30,77 triliun, naik menjadi Rp 37,79 triliun pada 2016
- Hasil pemantauan ICW dari 2010 sampai 2016, mulai 2014 korupsi dana jaminan kesehatan meningkat. Setidaknya ada 26 kasus korupsi terkait dana jaminan kesehatan dengan kerugian negara mencapai Rp 62 miliar.
- Permenkes 36/2015 tentang Pencegahan Fraud dalam Implementasi Jaminan Kesehatan belum sepenuhnya dijalankan

*Berdasarkan hasil pemantauan ICW, setidaknya ada 49 potensi kecurangan dari implementasi JKN di 14 daerah pemantauan ICW yang dilakukan oleh peserta, petugas fasilitas kesehatan, BPJS Kesehatan maupun perusahaan obat*

- Secara umum, korupsi di sektor kesehatan masih terjadi, Paling tidak ada 219 kasus korupsi di sektor kesehatan yang merugikan negara mencapai Rp 890 miliar pada tahun 2010 sampai 2016



## Bidang : Reformasi Birokrasi & Pelayanan Publik

### Pengadaan Barang dan Jasa Masih Menjadi Sasaran Empuk Korupsi

Tabel II. Anggaran Pengadaan Barang dan Jasa: Manual VS E-tendering 2014 - 2016

Tahun	Belanja Barang, Jasa Modal APBD	Belanja Barang, Jasa Modal APBN	Jumlah Belanja Barang Jasa Modal	E-tendering*	%
2014	397,68 T	385,1 T	782,78 T	310,05 T	39,61
2015	375,77 T	514,6 T	890,38 T	318,43 T	35,76
2016	471,11 T	527,0 T	998,11 T	398,99 T	39,97

Tabel 1. Jumlah Kasus Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa 2015 - 2017

No	Tahun	Jumlah Kasus	Kerugian Negara
1	2015	149 (27% dari 550 kasus)	
2	2016	195 (41% dari 482 kasus)	Rp 680 miliar
3	2017 (smstr I)	94 (35% dari 266 kasus)	

- Target pemerintah melaksanakan pengadaan barang dan jasa 100% secara elektronik dalam Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi tahun 2016 dan 2017 belum tercapai.
- Meskipun pemerintah sudah menerapkan sistem pengadaan barang dan jasa secara elektronik, tidak serta merta menghilangkan korupsi.
- Setidaknya rata - rata 34% kasus korupsi yang terjadi setiap tahunnya berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa
- Pemerintah perlu menerapkan dan mengintegrasikan e-planning, e-budgeting, e-procurement, e-monev
- Disisi lain, semakin beragamnya produk yang ditawarkan dalam e-katalog perlu

## **Bidang : Keadilan Ekonomi dan Kedaulatan SDA**

- Ekonomi sebagai tulang punggung pembangunan negara dimanifestasikan dalam dinamika pertumbuhan pendapatan dan belanja negara (APBN). Dengan semakin besar pendapatan negara maka akan semakin besar alokasi anggaran yang bisa digunakan guna mewujudkan cita cita kemerdekaan indonesia.
- Salah satu butir dalam nawacita pemerintahan Jokowi – JK adalah “mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor sektor strategis ekonomi domestik”.

### **Catatan 3 Tahun Jokowi – JK :**

- Belum optimalnya pemerintah dalam memperbaiki dan menata pengelolaan kekayaan sumber daya alam indonesia (SDA) guna sebesar – sebesarnnya bagi kemakmuran rakyat:
  - Penataan izin pertambangan (IUP) yang berlarut-larut. Dari 9.147 IUP (status Agustus 2017), 6.548 IUP berstatus *Clean n Clear* dan 2.599 IUP berstatus non *Clean n Clear* dan harus dicabut/dihentikan izinnya. Tetapi hingga kini tidak jelas kelanjutan prosesnya.
  - Lambatnya amandeman Kontrak Karya Pertambangan dan Batubara (PKP2B). Hingga Juni 2017, dari total 102 Kontrak baru 58 yang setuju untuk diamandem (yaitu; KK 21, PKP2B 37) sementara 48 kontrak belum setuju (KK 12, PKP2B 32)
    - Gagalnya Indonesia menguasai tambang PT Freeport Indonesia 100% (2021) serta skenario divestasi saham PT FI yang tidak jelas.

## **Bidang : Keadilan Ekonomi dan Kedaulatan SDA**

- Turunnya rasio penerimaan pajak Indonesia yaitu sebesar 11,9% (tahun 2014), 10,9% (2015) dan 10,3% (2016) padahal pemerintah menargetkan rasio penerimaan pajak Indonesia akan menjadi 16% pada tahun 2019.
  - Program pengampunan pajak yang terburu buru pada akhir semester 2016, meski dari sisi deklarasi harta dianggap cukup sukses yaitu Rp 4.884 triliun tetapi hanya Rp 147 triliun yang akan direpatiasi.
- Kenaikan jumlah piutang negara; Kenaikan Piutang dari Rp 242 triliun tahun 2014 menjadi Rp 276 triliun pada tahun 2016, serta kenaikan penyisihan piutang tidak tertagih dari Rp 149 triliun (2014) menjadi Rp 185 triliun (2016).
- Pencabutan subsidi energi (BBM dan Listrik) tidak diimbangi dengan perbaikan transparansi dan akuntabilitas sektor energi.
  - Belum jelasnya arah perbaikan BUMN energi dan pemberantasan mafia energi.
  - Ketergantungan yang tinggi pada energi fosil serta belum adanya peta jalan dalam pengembangan energi terbarukan yang ramah lingkungan dan berkelanjutan.

# Kesimpulan

- Secara keseluruhan ICW menilai bahwa program pemberantasan korupsi, perbaikan sektor birokrasi dan perbaikan tata kelola pemerintahan pada sektor strategis seperti energi dan SDA tidak memuaskan
- Usaha itu bukan tidak ada, namun tidak menunjukkan level yang serius dan berkomitmen. Akibatnya, berbagai implementasi kebijakan maupun substansi kebijakan belum sejalan dengan semangat NawaCita.
- Pemerintah tidak menyiapkan berbagai langkah pencegahan untuk menghindari korupsi akibat dari penambahan alokasi anggaran pada sektor JKN dan Dana Desa.

- 68.03% kekuatan partai yang mendukung Jkw-JK seharusnya menjadi kendaraan politik yang stabil bagi pemerintah untuk mengambil dan menjalankan kebijakan dengan lebih tegas.
- Namun Presiden tersandera untuk membalas budi dukungannya pada anggota koalisinya, yang masing-masing partai memiliki *interest* atas kekuasaan sehingga program reformasi dan perbaikan tata kelola pemerintah yang baik tidak banyak didukung.

# Rekomendasi

- Segera menginisiasi Revisi UU Partai Politik yang fokus pada pembenahan rekrutmen dan kaderisasi, demokrasi internal partai, pendanaan yang transparan dan akuntabel, serta penegakan hukum.
- Mempercepat agenda perbaikan internal lembaga penegak hukum, jika perlu, mengganti para pembantunya yang tidak sejalan dengan program kerjanya.
- Pemberantasan mafia sektor penegakan hukum harus dilengkapi dengan upaya memperbaiki kultur organisasi, perbaikan pada tata laksana, struktur organisasi, dan perbaikan pada aspek kesejahteraan mereka sebagai personal.



- Pada konteks dana desa, perlu dirumuskan sebagai kebijakan yang memadai untuk menekan penyimpangan dana desa. Pemerintah perlu menimbang rekomendasi yang telah disusun KPK untuk mengatasi masalah korupsi dana desa.
- Upaya penegakan hukum melalui tim saber pungli harus dilanjutkan dengan agenda reformasi kelembagaan yang mendasar, seperti penyederhanaan prosedur, perbaikan SOP, penyederhanaan aturan.
- Mendorong penerapan 100% pengadaan pemerintah melalui elektronik.

- Penguatan pada lembaga antikorupsi yang independen seperti KPK harus lebih konkret, mengingat sampai hari ini, serangan terhadap lembaga itu masih terus terjadi.
- Pemerintah juga perlu mempromosikan dengan segera berbagai kebijakan yang mendukung upaya pemberantasan korupsi dan pencucian uang seperti UU Pemulihan Aset dan UU Pembatasan Transaksi Tunai.
- pemerintah perlu menggandeng berbagai pihak, terutama KPK untuk membuat roadmap reformasi yang lebih terukur, terbuka dan melibatkan partisipasi publik yang luas, agar percepatan reformasi sektor energi dan SDA dapat mencegah kerusakan lingkungan yang kian parah, larinya dana sektor ini ke berbagai tempat secara illegal, dan kerugian negara yang makin besar akibat dari carut-marutnya tata laksana dan tata kelola di sektor ini.